



Analisis Determinasi Indeks Pembangunan Manusia

Fenty Y. Manuhutu¹⁾, Marten A.I. Nahumury¹⁾, Esy Lewaherilla¹⁾
Universitas Musamus
email : manuhutu@unmus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Dibidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Papua. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dari tahun 2013 hingga 2024. Data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif serta teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai t hitungnya sebesar 1,532 serta nilai t tabel 2,25462 yang diperoleh dari rumus t tabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,195. Jika dilihat nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$. Pada variabel pengeluaran pemerintah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai t hitung sebesar 10,455 dan nilai t tabel 2,26462 yang diperoleh dari rumus t tabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Jika dilihat nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan secara simultan variabel tingkat kemiskinan dan pengeluaran Pemerintah dibidang pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua
Kata kunci : Tingkat Kemiskinan; Pengeluaran Pemerintah; Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

This study aim to analyze influence of Poverty Level And Expenditure Government In the field Education To Human Development Index (HDI) in Papua Province Type of data used namely secondary data taken from 2013 to 2024 Data analyzed with use method quantitative as well as technique analysis multiple linear regression with help SPSS version 21 application Results study show in a way Partial level poverty No influential significant to Human Development Index with the calculated t value amounting to 1,532 as well The t table value of 2.25462 was obtained from t table formula And mark its significance of 0.195. If seen calculated t value $< t$ table and mark significance > 0.05 On variable expenditure government in the field education in a way Partial own significant influence to index development man with calculated t value amounting to 10,455 and the t table value of 2.26462 was obtained from t table formula and mark its significance of 0.000. If seen calculated t value $> t$ table and mark significance < 0.05 Whereas in a way simultaneous variable level poverty and expenditure Government in the field education own influence to index development humans in Papua Province.

Keyword : Poverty level; Government Expenditure; Human Development Index.

✉ Alamat korespondensi: Ekonomi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Musamus
Jl.Kamizaun, Mopah Lama, Merauke
99600 Indonesia
Email: ¹⁾ manuhutu@unmus.ac.id

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian yang menunjukkan usaha pembangunan manusia sudah mulai berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala dimana terjadi fluktuasi pengembangan IPM di Provinsi Papua. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkan konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya (Aryo, 2020). Menurut Human Development Report (HDR), 1990 mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah (Akbar, 2016). Salah satu belanja pemerintah untuk pembangunan di sektor publik dalam menunjang pembangunan manusia adalah belanja pemerintah di bidang pendidikan, untuk menunjang dan mencapai indikator dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada bidang pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.

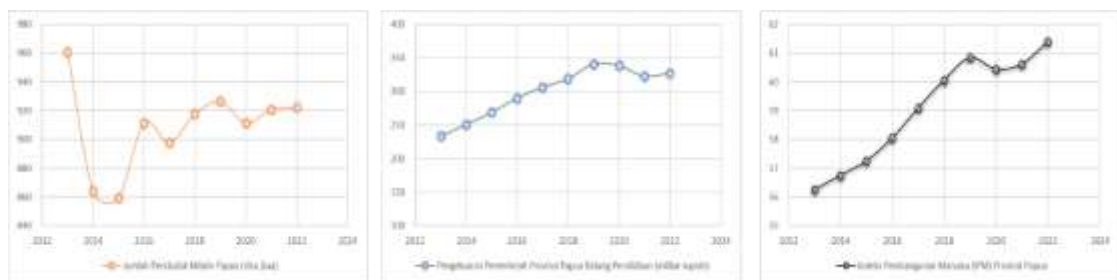
Referensi penelitian sebelumnya menyoroti peran beberapa faktor dalam memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan ukuran penting untuk mengukur kesejahteraan manusia. menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM, kemungkinan terjadinya tingkat kemiskinan yang rendah menjadi lebih besar (Lewaherilla, 2021). Di sisi lain, (Fangohoy, 2020) mengungkapkan bahwa peningkatan Dana Otonomi Khusus tidak berdampak pada peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia di Merauke. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pengalokasian dana dalam meningkatkan kesejahteraan manusia di daerah tersebut. (Lembang & Siman, 2024) Dalam bukunya “transformasi kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua” menyoroti bahwa pembangunan manusia dan kesejahteraan masih menjadi tantangan besar, terutama karena jumlah penduduk miskin yang sangat besar yang terkonsentrasi di daerah pedesaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Papua memerlukan perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi pemerintah dalam bidang Pendidikan. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara pembangunan manusia, kemiskinan, dan alokasi dana pemerintah.

Masalah kemiskinan di Provinsi Papua dimana jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi yang menyebabkan terhambatnya proses dalam mencapai kesejahteraan yang ingin dicapai oleh setiap negara didunia dimana indeks pembangunan manusia menjadi standar kesejahteraan yang didalamnya terdapat komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli. Dalam mencapai kesejahteraan maka diperlukan penanganan terkait masalah kemiskinan yang ada. Masalah yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sudah sangat baik namun, peningkatan pengeluaran pemerintah itu tidak dapat mengurangi masalah yang ada dimana masalah pendidikan. Masih terdapat banyak anak yang tidak bisa bersekolah karena keterbatasan ekonomi. Pengeluaran yang setiap tahunnya meningkat belum efektif dan tepat sasaran sehingga menyebabkan belum bisa tercapainya kesejahteraan di Provinsi Papua (Nabut, 2021). Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak, serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi semuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga akan berdampak pada terbatasnya upah yang diperoleh, sehingga dalam perkembangannya dapat mempengaruhi tingkat pembangunan manusia disuatu daerah. Salah satu masalah pembangunan manusia di Provinsi Papua yaitu berkaitan dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yang tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dalam IPM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang relative cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya khususnya di pulau Papua (Ramli, 2023).

Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan seperti daerah lainnya namun dalam penanganannya cenderung berbeda antara

daerah satu dengan lainnya. Berdasarkan kondisi geografis terdapat 2 kabupaten yakni Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang berjarak 27 km dan 42 km dari ibukota, sementara rata-rata jarak daerah kabupaten yang lain dengan ibukota berjarak 400 km. Kondisi ini bila tidak didukung dengan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang memadai berdampak memperparah tingkat kemiskinan. (Manuhutu et al., 2023)



Grafik: Penduduk Miskin; Pengeluaran Pemerintah , I P M

Tren data (grafik 1) menunjukkan peningkatan pengeluaran pemerintah provinsi Papua untuk bidang pendidikan dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah penduduk miskin Papua mengalami fluktuasi, secara umum terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Dampaknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tersebut, yang mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua guna memberikan pemahaman dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut.

METODE *(Style Heading 3)*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Data sekunder digunakan dari BPS dengan data IPM, tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) dan pengeluaran pemerintah di pendidikan (rupiah) 2013-2022. Model regresi linear berganda digunakan dengan persamaan:

$$I P M = \beta_0 + \beta_1 * \text{Kemiskinan} + \beta_2 * \text{Pengeluaran Pemerintah} + \varepsilon$$

Penggunaan Logaritma Natural (LN) sebagai pengganti satuan data linier pada variabel independen dilakukan agar variabel independen dapat dikaji terhadap variabel dependen dengan lebih tepat..

HASIL DAN PEMBAHASAN (Styles Heading 3)

A. Hasil (Styles Heading 4)

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, nilai p (signifikansi asimtotik) adalah 0,783, yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti untuk menolak hipotesis nol. Dalam Model 1 dengan variabel dependen IPM, ditemukan bahwa variabel independen "Jumlah Penduduk Miskin" memiliki koefisien regresi sebesar 0.126, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada "Jumlah Penduduk Miskin" akan meningkatkan IPM sebesar 0.126 unit, sementara "Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan" memiliki koefisien 229 yang menunjukkan hubungan positif yang kuat dengan IPM, dengan kedua variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM ($p < 0.05$). Sementara pada Model 2 dengan variabel dependen Abs_RES, (Absorpsi Realisasi Anggaran belanja Pemerintah Daerah secara Keseluruhan) sebagai gambaran sejauh mana pemerintah daerah telah merealisasikan atau menghabiskan anggaran belanja mereka pada suatu periode tertentu sebagai indikator untuk melihat efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. koefisien regresi Abs_RES untuk "Jumlah Penduduk Miskin" adalah -0.003 menunjukkan pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan terhadap Abs_RES, sedangkan "Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan" memiliki koefisien 0.013 yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Abs_RES.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam kedua model, karena nilai toleransi yang tinggi (> 0.9) dan VIF yang rendah (< 1.1). Oleh karena itu, tidak diperlukan tindakan korektif terkait multikolinearitas. Selain itu, uji Runs Test menunjukkan p-value sebesar 0.737, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat bukti signifikan terhadap adanya autokorelasi dalam data yang diuji. Sehingga, tidak ada autokorelasi yang perlu dikhawatirkan dalam analisis yang dilakukan. (lihat tabel 2)

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Statistic Regresi

Uji	Hasil statistik uji	Deskripsi	Kesimpulan
Kolmogorov-Smirnov	p-value = 0.783	Residu model regresi terdistribusi normal	Residu model terdistribusi normal
Koefisien Regresi (Model 1)	"Jumlah Penduduk Miskin": koef = 0.126, p < 0.05	Pengaruh signifikan "Jumlah Penduduk Miskin" terhadap IPM, "Pengeluaran pemerintah" berkorelasi positif IPM	Pengaruh signifikan "Jumlah Penduduk Miskin" dan "Pengeluaran pemerintah" terhadap IPM

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel "Pengeluaran pemerintah" memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) yang sangat kecil (0.000) dan nilai t-statistik yang besar (10.355). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan berdampak positif pada peningkatan IPM. Sebaliknya, variabel "Jumlah Penduduk Miskin" tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai signifikansi (Sig.) yang lebih besar dari 0.05 (0.195) menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini tidak signifikan. (lihat table 3)

Tabel 3. Uji Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien (B)	Std. Error	Beta	t-statistik	Sig.
Konstanta	-4.221	1.265	0.000	-3.337	0.012
Penduduk Miskin	-0.117	0.088	0.130	-1.434	0.195
Pengeluaran Pemerintah	0.139	0.022	0.941	10.355	0.000

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, ditemukan bahwa konstanta model memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh nilai t yang signifikan (-3.337). Hasil uji juga menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin tidak berbeda secara signifikan dari nol, yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Di sisi lain, variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM dengan nilai t sebesar 10.355. Uji F menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, di mana setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan nilai R Square sebesar 0.944, 94.4% varians IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi tersebut.

Tabel 4. Uji T, Uji F, dan Uji Determinasi

Uji	Hasil Uji	Deskripsi	Kesimpulan
Uji t Konstanta	$t = -3.337$	Konstanta model berbeda secara signifikan dari nol pada tingkat signifikansi 5%	Konstanta memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM
Uji t Penduduk	$t = -1.434$	Variabel jumlah penduduk miskin TIDAK berbeda secara signifikan dari nol pada tingkat signifikansi 5%	Jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM
Uji t Pengeluaran Pemerintah	$t = 10.355$	Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berbeda secara signifikan dari nol pada tingkat signifikansi 5%	Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM
Uji F	$F = 58.708$	Model regresi secara keseluruhan signifikan ($p = 0.000$). Setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (IPM).	Model regresi secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM
R Square	0.944	94.4% varians IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan jumlah penduduk miskin.	Variabel independen dalam model mampu menjelaskan sebagian besar varians IPM.

B. Pembahasan (Styles Heading 4)

1. 1. Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis uji t menyatakan bahwa variabel tingkat kemiskinan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Hal ini dilihat dari besar nilai koefisien regresi tingkat kemiskinan (X_1) sebesar -0,117 artinya bahwa ketika tingkat kemiskinan mengalami kenaikan maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan yang

seharusnya jika pemerintah berusaha menurunkan angka kemiskinan tentunya indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Jadi terdapat hubungan searah antara IPM dan tingkat kemiskinan (Lumi et al., 2022) dan sejalan dengan hipotesis bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sapaat, 2020) berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan, 2020) yang berjudul “Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia” Yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Hal ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi di Provinsi Papua dikarenakan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan yang jauh dari kota mengalami keterbelakangan ekonomi yang dimana harga barang serta kebutuhan pokok di daerah pelosok sangatlah mahal dibanding kota. Hal ini sejalan dengan teori human capital mengenai kesejahteraan masyarakat dan produktivitas manusia yang diperkuat oleh teori lingkaran kemiskinan yaitu kemiskinan hadir dari adanya keterbelakangan ekonomi sehingga masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga menyebabkan produktivitas manusia berkurang dan berdampak pada perkembangan pembangunan manusia. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Papua seperti minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur, dan banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau dipercaya sebagai faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Papua. Selain itu, kenaikan harga pangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi ditingkat menjadi penyebab Tingkat kemiskinan tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua.

Dalam teori lingkaran setan kemiskinan, ketidaksempurnaan pasar dan ketergantungan menyebabkan produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas akan berdampak pada minimnya pendapatan yang diperoleh, rendahnya penghasilan membawa dampak pada tabungan dan investasi lebih rendah. Investasi yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat modal, dan pembangunan yang tidak memadai. Rendahnya modal menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan pasar

serta keterbelakangan. Hal ini terus bergerak melingkar dan tidak memiliki ujung, sehingga disebut lingkaran setan. Demikian yang terjadi di Provinsi Papua kemiskinan terjadi akibat ketidaksempurnaan pasar dan ketergantungan penduduk terhadap bantuan yang diberikan pemerintah yang menyebabkan produktivitas masyarakat rendah dan berdampak pada minimnya pendapatan, rendahnya tabungan serta pembangunan yang tidak memadai menjadi penyebab tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sapaat, 2020) berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan, 2020) yang berjudul "Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia" Yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hal ini terjadi karena, belum terpenuhinya kemampuan seseorang dalam masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar. Disamping itu, banyaknya program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sesuai target. Selain itu, tidak berpengaruhnya variabel kemiskinan dalam jangka pendek disebabkan meningkatnya harga barang yang berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita disaat kemiskinan manurun.

Hal ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi di Provinsi Papua dikarenakan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan yang jauh dari kota mengalami keterbelakangan ekonomi yang dimana harga barang serta kebutuhan pokok di daerah pelosok sangatlah mahal dibanding kota. Hal ini sejalan dengan teori human capital mengenai kesejahteraan masyarakat dan produktivitas manusia yang diperkuat oleh teori lingkaran kemiskinan yaitu kemiskinan hadir dari adanya keterbelakangan ekonomi sehingga masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga menyebabkan produktivitas manusia berkurang dan berdampak pada perkembangan pembangunan manusia. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Papua seperti minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur, dan banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau dipercaya sebagai faktor penyebab tingginya

tingkat kemiskinan di Papua (Andry, 2015a, 2015b). Selain itu, kenaikan harga pangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi ditingkat perdesaan menjadi penyebab Tingkat kemiskinan tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua (BPS PAPUA, 2018).

Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Binimkof, 2020) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Merauke Tahun 2010- 2018” yang menyatakan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar (Sukmaraga, n.d.). Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya penduduk miskin.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup pembangunan manusia, rendahnya indeks pembangunan manusia akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berdampak pada rendahnya problem pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin.

2. 2. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2013 hingga 2022 dengan nilai koefisien sebesar 0,229, menunjukkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan naik 1% maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,229. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menerangkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Invantoro, 2019) judul penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Batam “. Hasil penelitiannya diperoleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Batam. Hasil analisis ini sesuai dengan teori (Putri, 2021), yang menyatakan investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun sarana

dan system pendidikan yang baik. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Binimkof, 2020) yang mana meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Merauke Tahun 2010-2018”. Dan hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Merauke. Kemudian hasil ini diperkuat oleh teori Wagner & Weber (1977), menyatakan apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan, dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.

Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Rosmia, 2018) judul penelitian tentang “pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Belum signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan karena masih adanya disparitas pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang cukup besar.

Terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki sekolah Taman Kanak-kanak (TK) seperti Kabupaten Puncak Jaya merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki fasilitas Pendidikan baik TK maupun RA/BA. Puncak Jaya merupakan kabupaten dengan persentase desa/kelurahan yang memiliki SD/MI terendah di Provinsi Papua, yaitu hanya ada 8,61 persen saja desa/kelurahan yang memiliki SD/MI di wilayahnya. Berbeda tipis dengan Tolikara dan Nduga, dengan persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan SD/MI masing-masing 10,64 persen dan 10,89 persen. Selain itu, persebaran fasilitas pendidikan setingkat SMP masih belum merata di Papua. Total desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan SMP/MTs di Provinsi Papua bahkan hanya mencapai angka 11,07 persen.

Hal ini dapat diartikan bahwa ada hampir 90 persen desa/kelurahan di Provinsi Papua yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMP/MTs. Sedangkan persentase terendah yaitu Kabupaten Puncak Jaya dengan persentase hanya 2,32 persen desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan SMP/MTs, kemudian Kabupaten Nduga di urutan kedua terendah dengan 3,23 persen saja desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan SMP/MTs.

Kemudian persentase terendah yaitu Kabupaten Yahukimo dengan hanya ada 0,39 persen desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan SMA/MA/SMK. Kemudian Kabupaten Nduga dengan 0,81 persen. Cukup miris mengingat wajib belajar kini sudah ditetapkan menjadi 12 tahun namun fasilitas pendidikan setingkat SMA persebarannya masih belum rendah di wilayah Provinsi Papua. Pembangunan infrastruktur akademi/ perguruan tinggi harus mulai mendapatkan perhatian dan sistem pengelolaan yang baik seiring dengan kesadaran penduduk Papua mengenai pentingnya pendidikan lanjutan setelah pendidikan menengah dalam menghadapi tuntutan zaman. (BPS PAPUA, 2020) seharusnya Pemerintah memberikan perhatian lebih mengenai ketersediaan infrastruktur SD/MI karena pendidikan setingkat SD merupakan pendidikan dasar yang penting bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Selain ketersediaan fasilitas SD sederajat di suatu desa, kemudahan akses untuk menjangkau fasilitas serupa dari desa yang tidak memiliki fasilitas SD/MI menuju fasilitas di desa terdekat merupakan hal yang perlu ditingkatkan. Selain fasilitas pendidikan setingkat SD, fasilitas pendidikan setingkat SMP juga perlu menjadi perhatian, apalagi mengingat kini wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun. Namun sayangnya persebaran fasilitas pendidikan setingkat SMP masih belum merata di Papua. Total desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan SMP/MTs di Provinsi Papua bahkan hanya mencapai angka 11,07 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa ada hampir 90 persen desa/kelurahan di Provinsi Papua yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMP/MTs. Kesulitan mengakses fasilitas pendidikan memang masih menjadi tantangan besar di Papua. Tidak sedikit anak usia sekolah yang akhirnya tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP sederajat karena akses ke fasilitas pendidikan setingkat SMP yang masih sulit. Tidak sedikit pula anak yang harus tinggal jauh dengan orang tua untuk melanjutkan pendidikan setingkat SMP karena harus tinggal di daerah yang memiliki fasilitas pendidikan SMP sederajat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitiannya (Damayanti, 2014) "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis

Spatial Heterogeneity". Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga masih belum terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dan siswa tetapi lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga hal ini kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

KESIMPULAN

Meskipun tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua, namun pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks tersebut. Secara simultan, kedua faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua, menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan maupun pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan Indeks Pembangunan Manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terkait hal itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Kepala Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Merauke, dan tim Dosen/Peneliti yang terlibat sejak awal sampai dengan selesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Akbar. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasi Sekolah (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 46–64.
- [2]. Andry. (2015a). *Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua*. Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua.
- [3]. Andry. (2015b). *Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua*. Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua.
- [4]. Aryo, W. B. (2020). *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- [5]. Binimkof, A. (2020). *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Merauke Tahun*

2010-2018.

- [6]. BPS PAPUA. (2018). *Papua Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- [7]. BPS PAPUA. (2020). *Statistik Infrastruktur Provinsi Papua*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2020.
- [8]. Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*.
- [9]. Fangohoy, A. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Musamus Journal of Economics Development*, 35–43.
- [10]. Hasibuan, L. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2).
- [11]. Invantoro, D. (2019). *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Batam*. Skripsi thesis, Prodi Akuntansi.
- [12]. Lembang, H., & Siman, S. (2024). *Transformasi Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua*. Penerbitan Jakad Media.
- [13]. Lewaherilla, E. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan di masa pandemi covid-19. *Jurnal Musamus Ekonomi Pembangunan*, 57–63.
- [14]. Lumi, A. N. M., Kindangen, P., & Rorong, I. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada 8 Kabupaten di Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(2), 220–244.
- [15]. Manuhutu, F., Nahumury, M. A., & Batlajery, S. (2023). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 14(2), 82–93.
- [16]. Nabut, B. S. (2021). PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Kantor Desa Cilebut Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 494–512.
- [17]. Putri, W. B. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- [18]. Ramli, F. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, PDRB, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap IPM Di Provinsi Papua

- Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 1677.
- [19]. Rosmia, A. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di propinsi kalimantan timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*.
- [20]. Sapaat, L. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- [21]. Sukmaraga, P. (n.d.). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*.